

DIALEKTIKA SENI PERTUNJUKAN RAKYAT
DI RIAU KEPULAUAN
(Suatu Retorika Budaya)

Oleh : Sutamat Arybowo
Peneliti PMB-LIPI dan Asosiasi Tradisi Lisan

1. Pengantar

Tulisan ini bermula dari selayang pandang mengenai berbagai masalah kehidupan kesenian rakyat yang muncul di balik “kesuksesan” revitalisasi seni pertunjukkan tradisional di Batam – Bintan dan sekitarnya. Suatu pengamatan yang saya tangkap ketika saya melakukan penelitian tentang kesenian tradisional Melayu di Riau Kepulauan pada tahun 2000. Masalah-masalah yang muncul dibalik “kesuksesan” itu, meski merupakan gejala umum di Indonesia, tetap dipandang penting untuk dikaji secara seksama. Hal ini disebabkan saya tetap berharap agar “kesuksesan” itu tidak terlalu “artifisial”.

Mengapa masalah kesuksesan artifisial yang disorot ? Diabad yang lampau sebagaimana dikemukakan oleh BM Syamsudin (1995) bahwa suku bangsa Melayu seperti halnya suku bangsa Jawa, yaitu memiliki keuletan dan proses kreatif di berbagai bidang kesenian, dan memiliki apresiasi terhadap karya seni menenun, juga berseni sastra. Contohnya dalam seni sastra lisan, mereka punya berbagai macam seni berpantun, seni bercerita, seni lakon, seni nyanyian panjang, dan sebagainya.

Melalui contoh tersebut tidak bermaksud untuk menguji keberhasilan dan kemajuan dunia Melayu sekarang, melainkan hanyalah sekedar pengantar untuk berangkat ke lapangan melihat realita yang ada. Justru dari realita itu sambil berpaling kepada selayang pandang tersebut, muncul suatu persoalan : Mengapa masyarakat Riau Kepulauan atau tepatnya masyarakat setempat cenderung tersisih dalam pergumulan di tengah-tengah proses desentralisasi budaya pada

*) Makalah Simposium Internasional Globalisasi dan Kebudayaan Lokal : Suatu Dialektika Menuju Indonesia Baru, Padang, 18 – 21 Juli 2001

saat ini ? Bisa saja masyarakat Riau Kepulauan benar-benar “belum siap” menyongsong desentralisasi kebudayaan sebagaimana sering dikatakan orang luar. Tetapi juga sangat mungkin karena desentralisasi kebudayaan yang diterapkan sekarang ini lebih merupakan “anarkisme” yang kurang peduli terhadap hati nurani masyarakat Riau Kepulauan.

Jadi tulisan ini difokuskan untuk melihat kondisi desentralisasi kebudayaan dengan studi kasus mengamati sejauh mana popularitas suatu seni pertunjukkan rakyat di Riau Kepulauan, serta melihat potensinya melalui retorika budaya dalam rangka resistensi menghadapi proses demokratisasi di Indonesia dan globalisasi.

2. Cara Melihat permasalahan

Sejak tahun 1990-an saya punya beberapa informan di Batam dan Bintan. Setiap saya datang ke rumahnya saya melakukan wawancara mendalam dari hati ke hati. Diantara informan sering pula mengajak saya berjalan-jalan untuk membaca alam, menonton pertunjukkan dan membongkar realitas sosial – budaya dikalangan masyarakat Riau Kepulauan (Melayu Riau). Dari merekalah saya memperoleh informasi dan literatur mengenai pandangan hidup orang Riau Kepulauan dan budaya Melayu. Dari kampung ke kampung di wilayah Riau Kepulauan yang menyebar bagai segantang lada, saya melakukan hal yang sama. Selain informasi tentang gegap gempitanya proses industrialisasi dan pengusuran-pengusuran perkampungan pantai, saya menangkap euforia mereka mengenai jasa pahlawan Riau dalam dunia sastra dan keberhasilan bangkitnya pertunjukkan kesenian Melayu dihotel-hotel, juga semaraknya revitalisasi kesenian tradisional yang dilaksanakan oleh baik instansi pemerintah maupun lembaga swadaya masyarakat.

Program revitalisasi yang pernah dilaksanakan di Riau Kepulauan mengalami pasang surut. Saya mencoba menonton kesenian tradisional yang pernah populer tetapi hidupnya “mekar dan layu” , yakni Mendu di Natuna, Mak Yong di Bintan Timur, dan Wayang Bangsawan di Lingga Singkap. Entah kebetulan

*) Makalah Simposium Internasional Globalisasi dan Kebudayaan Lokal : Suatu Dialektika Menuju Indonesia Baru, Padang, 18 – 21 Juli 2001

atau disengaja, cerita-cerita yang dilakonkan saat itu merupakan ekspresi kesedihan mereka dalam menghadapi “keganasan” zaman. Berhubung masalah tersebut tampaknya sangat ekspresif dikalangan masyarakat Riau Kepulauan, maka pada esok harinya saya segera memburu melakukan serangkaian wawancara dengan para pemain dan sebagian penonton sambil menengok tempat tinggalnya.

Hal yang saya tonton dan perbincangkan, serta kunjungan saya dari rumah ke rumah itu, saya coba diskusikan dengan sejumlah tokoh masyarakat (eks pemuka adat). Hasilnya bahwa masyarakat setempat di Riau Kepulauan sedang mengalami pergumulan yang hebat. Pada masa Orde Baru mereka berhadapan dengan proses industrialisasi dan sekarang mereka kebingungan mengambil sikap untuk menentukan masa depannya. Banyak masalah seni – budaya yang muncul dan menggoncangkan kehidupan tradisional mereka, tadinya diarahkan menjadi masyarakat industri, dan sekarang diajak menjadi masyarakat “Propinsi” (baca otonomi).

Akhirnya tulisan ini belum bisa memberikan analisis yang mendalam, melainkan masih selayang pandang. Akan tetapi disini lain tulisan ini cukup jelas, bukan semata berangkat dari teori-teori atau prediksi-prediksi, melainkan dari harapan-harapan para informan dan para pelaku/pemain seni – budaya kalangan masyarakat lapis bawah. Disamping itu tujuan akhirnya saya mencoba berusaha mencari pemikiran-pemikiran apresiasif untuk memahami sejauhmana masyarakat Riau Kepulauan menumbuhkan penghargaan terhadap aneka ragam kesenian rakyat yang mereka miliki.

3. Temuan Lapangan

Ada beberapa event budaya yang pernah diikuti oleh group kesenian/seni pertunjukkan di Riau Kepulauan dan di luar Riau Kepulauan. Pada tahun 1993, group Mak Yong pimpinan Atan Rahman pernah diundang ke Jakarta untuk mengikuti “Festival Tradisi Lisan I”. Group tersebut hampir sepuluh tahun tidak

*) Makalah Simposium Internasional Globalisasi dan Kebudayaan Lokal : Suatu Dialektika Menuju Indonesia Baru, Padang, 18 – 21 Juli 2001

pernah pentas, kemudian ada semacam kegiatan revitalisasi dan ia bangkit/bersemangat berangkat ke Jakarta dengan biaya dari LSM dan subsidi dari Pemda Riau.

Begitu pula pada tahun 1999 sebuah group Joget Dang Kung yang anggotanya campuran dari Batam dan Bintan diundang juga mengikuti "Festival Budaya Nusantara", baik di Tanjung Pinang maupun di Jakarta. Bahkan setelah pentas dari Jakarta, group ini juga diundang ke Yogyakarta dan Bandung. Joget Dang Kung ini termasuk group yang sudah lama (lebih kurang 20 tahun) tidak pernah pentas dengan alasan sangat eksternal.

Pada tahun 2000, terdapat kegiatan yang cukup menarik yang disponsori "Para Penulis Serumpun Melayu" dari Malaysia. Kegiatan itu diberi nama "Pesta Melayu Serumpun", dan dilaksanakan di Kota Daik yang merupakan eks ibukota Kerajaan Riau – Lingga. Disamping mereka mengenang dan nostalgia terhadap kejayaan Riau – Lingga, mereka menampilkan Wayang Bangsawan, Zapin, dan lain-lain. Selanjutnya pada tahun yang sama, group Zapin dari Lingga juga diundang ke Malaka untuk menyemarakkan "Konvensyen Dunia Melayu Dunia Islam". Kemudian Zapin dari Lingga ini beberapa kali dengan sponsor Kerajaan Malaysia juga pernah melawat ke beberapa kota di negeri tersebut.

Bukan itu saja, beberapa group lainnya seperti Dendang Sayang dari Tanjung Riauh dan Penyengat sering mengadakan perlawatan dan kunjungan persahabatan/undangan dari Kerajaan Malaysia untuk memperingati hari besar di Malaysia.

Masing-masing group yang pernah pentas di berbagai daerah atau mancanegara tersebut sudah tentu memiliki suka dukanya. Pada masa semaraknya pembukaan proyek-proyek industri di Batam dan Bintan Utara, beberapa group diundang untuk menghibur pejabat/para tamu dari Pekanbaru dan Jakarta. Juga beberapa kali diundang untuk main di lobby hotel-hotel. Namun beberapa group mengatakan ibarat "habis manis sepah dibuang". Hal ini mungkin merupakan penyakit biasa karena akibat kontaminasi pikiran "proyek", sehingga

*) Makalah Simposium Internasional Globalisasi dan Kebudayaan Lokal : Suatu Dialektika Menuju Indonesia Baru, Padang, 18 – 21 Juli 2001

proyeknya selesai berarti perangkat lainnya termasuk group kesenian dianggap selesai pula.

Dalam hubungannya dengan dialektika seni pertunjukkan rakyat, saya memfokuskan diri mengamati group yang pernah diundang ke Jakarta dengan group yang pernah diundang ke Malaka atau Kualalumpur. Menurut hemat saya, terdapat hal yang penting untuk dikaji secara seksama yaitu mengenai "apresiasi" masyarakat pendukungnya atau tokoh masyarakat yang dianggap sebagai pemangku adat dan sebagai panutan masyarakat setempat.

Ada hal yang menyolok misalnya, mengapa beberapa tokoh masyarakat Riau Kepulauan kurang begitu apresiasif terhadap group Mak Yang dan group Dang Kung yang diundang ke Jakarta ? Dan mengapa tokoh masyarakat yang saya wawancarai lebih responsif terhadap group Zapin yang diundang ke Malaka dan Kualalumpur ?

Secara diam-diam tokoh masyarakat tersebut juga mengamati sejauhmana keadaan kesenian Melayu yang diundang ke Jakarta dan sejauhmana kesenian Melayu yang diundang ke Malaka dan Kualalumpur. Para informan yang saya wawancarai, apabila diajak bicara tentang Zapin ke Kualalumpur tampak sangat responsif, tetapi begitu menyinggung Mak Yong atau Dang Kung ke Jakarta, mimiknya seperti kurang berkenan dan acuh tak acuh. Hal inilah yang menjadikan saya penasaran mencari penyebabnya dan selalu merumuskan berbagai pertanyaan terhadap kedua group seni pertunjukan tersebut.

Sebenarnya penyebabnya amat panjang dan jawabannya menyinggung hal-hal yang sensitif terhadap identitas Melayu di Riau Kepulauan. Secara riil di lapangan masyarakat Riau Kepulauan adalah multietnis dan multikultur. Akan tetapi secara ideologis, orang Melayu di Riau Kepulauan masih kembali kepada identitas Melayu sebagaimana dianut oleh orang Melayu yang tinggal di Semenanjung Malaysia. Misalnya, yang disebut orang Melayu itu harus memenuhi tiga syarat, yaitu : Berbahasa Melayu, Beradat istiadat Melayu, dan Beragama Islam.

*) Makalah Simposium Internasional Globalisasi dan Kebudayaan Lokal : Suatu Dialektika Menuju Indonesia Baru, Padang, 18 – 21 Juli 2001

Tampaknya para pemuka masyarakat Melayu di Riau Kepulauan menilai kriteria kesenian Melayu juga masih dihubungkan dengan ideologi mereka bahwa kesenian tersebut harus bernuansa "Islam". Paling kurang ada penyebab, mengapa pertunjukkan Mak Yong dan Dang Kung belum mendapat respon dari tokoh Melayu. Pertama, selama ini pertunjukkan tersebut terpinggirkan dan kelihatan sekuler, lebih-lebih masih menggunakan "upacara buka tanah" yang dianggap tidak Islami. Malahan group Mak Yong di kabarkan sudah lama dilarang pentas oleh Pemerintah Malaysia karena kurang mencerminkan ke-Melayuan. Kedua, Pemerintah Jakarta (Indonesia), Mak Yong dan Dang Kung dianggap sebagai kesenian daerah. Ketiga, apresiasi kepanitiaan/penyelenggara kegiatan di Jakarta agak "merendahkan" (kurang menyambut dengan hangat) para delegasi dari Riau Kepulauan.

Lain halnya dengan group Zapin yang diundang ke Malaka atau Kualalumpur, tampak direspon tokoh masyarakat Melayu dengan gegap gempita. Pertama, kesenian tersebut, menurut pemuka masyarakat Melayu, lebih bernuansa Islami. Kedua, Zapin dianggap oleh orang Malaysia sebagai kesenian Nasional serumpun (dinasionalkan/bukan didaerahkan). Ketiga, ketika rombongan kesenian Melayu Riau datang ke Malaysia, pejabat yang menjemput di pelabuhan paling rendah Datuk Menteri Pemuda dan Kebudayaan atau Sultan Negeri Bagian.

Dengan kata lain, perbedaan penyambutan seperti itu juga menjadi kendala apresiasi bagi kondisi kesenian Melayu di Riau Kepulauan. Mereka lebih dihargai datang ke Malaysia dari pada ke Jakarta yang dianggap sebagai orang daerah. Akan tetapi sesungguhnya ada pula sebab lain, barangkali pertimbangan ekonomi. Apabila kesenian Melayu Riau diundang di Malaysia, "imbangan" yang diterima group cukup tinggi, sedangkan kalau diundang di Jakarta, "imbangan" nya lebih rendah atau "pas-pasan" sebagai pengganti transport saja.

4. Retorika Budaya Melayu

Pada tahun 1970-an ada semacam rasa bahwa pemuka masyarakat Melayu Riau merasa khawatir, bila kebudayaan Melayu Riau akan hilang atau punah. Juga identitas Melayu akan pudar, akibat perubahan sosial politik Orde Baru dan proses industrialisasi Batam – Bintan. Hal ini dirasakan pula oleh daerah lain di Indonesia, karena perubahan politik pasca G.30.S/PKI, dimana-mana daerah hampir mengalami nasib serupa.

Kemudian antitesanya, pada tahun 1980-an, "negara" melalui GBHN-nya menyusun rumusan agar kebudayaan daerah, termasuk sastra lama, kesenian, adat istiadat dihidupkan kembali dengan mengadakan penggalian, pelestarian dan pembinaan. Semua itu dimaksudkan untuk menyangga dan memajukan kebudayaan nasional yang di-idolakan oleh Pemerintah Orde Baru.

Setelah rumusan GBHN tersebut dijabarkan dan dioperasionalkan di daerah-daerah, maka pemerintah daerah Riau, mencoba menangkap rumusan tersebut yang dalam hal ini saya kategorikan sebagai sintesa dari kedua pernyataan di atas. Sintesanya yaitu terjadi "Kebangkitan Melayu Riau" yang ditandai dengan penyelenggaraan "Musyawarah Lembaga Adat 1982" di Pekanbaru, dan "Pertemuan Budaya Melayu 1985" di Pekanbaru dan Tanjungpinang. Sekaligus pembukaan "Pusat Informasi Kebudayaan Melayu"/Melayunologi, yang pada perkembangannya menjadi "Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Riau di Tanjungpinang". Hal itu saya anggap sebagai sintesa ada kekhawatiran budaya Melayu punah dengan pembinaan dan pelestarian.

Munculnya retorika budaya itu, ternyata belum mengurangi permasalahan yang dihadapi group seni pertunjukkan rakyat di Riau Kepulauan. Pada masa lalu (Orde Baru), tumbuhnya proses kreatifitas dalam seni pertunjukkan tampak dimunculkan dari atas melalui proyek pembinaan, pelestarian, dan pendokumentasian. Masyarakat pelaku seni pertunjukkan diharapkan memberikan respons positif terhadap tawaran tersebut. sebabnya, "negara" bermaksud memberikan motivasi agar terwujud partisipasi masyarakat secara maksimal untuk

*) Makalah Simposium Internasional Globalisasi dan Kebudayaan Lokal : Suatu Dialektika Menuju Indonesia Baru, Padang, 18 – 21 Juli 2001

tujuan pembangunan. Kemudian dewasa ini (era reformasi), tampaknya tawaran seperti itu dianggap kurang efektif, oleh karena itu "negara" membebaskan kepada rakyatnya agar menumbuhkan proses kreatif dari bawah dengan dalih desentralisasi kebudayaan. Bahkan secara ekstrim pihak pemerintah sekarang berpandangan bahwa "kebudayaan adalah milik rakyat".

Pelaku budaya/seni pertunjukkan rakyat di Riau Kepulauan, tampaknya merespons pandangan tersebut secara dingin. Kalaupun mereka ikut-ikutan menghadapi perubahan melalui ekspresi mereka, dapat dikatakan hanyalah suatu retorika yang sifatnya insidental. Pelaku/pendukung seni pertunjukkan rakyat di Riau Kepulauan hingga kini belum dapat memanfaatkan secara maksimal untuk kepentingan event budaya.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Alatas, Syed Hussein

1989 Mitos Pribumi Malas, Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Pendidikan Malaysia.

Andaya, Leonard Y.

1975 The Kingdom of Johor 1641 –1728 , Kuala Lumpur : Oxford University Press.

Beng, Tan Sooi

1993 Bangsawan : A Social and Stylistic History of Popular Malay Opera, Singapore : Oxford University Press.

Budisantoso, dkk

1986 Masyarakat Melayu Riau dan Kebudayaannya, Pekanbaru : Pemda Tk. 1 Riau.

Chambert – Loir, Henri

1994 “Wawasan Politik Sedunia Dalam Hikayat Hang Tuah”, kertas kerja Kongres Bahasa Melayu Sedunia, Kuala Lumpur, 21 – 25 Agustus.

Effendy, Bisni, Sutamat Arybowo dan Puderita MPSS

1992 Penelitian Sastra Melayu : Seni Pertunjukkan Rakyat di Kepulauan Riau, Jakarta PMB - LIPI.

*) Makalah Simposium Internasional Globalisasi dan Kebudayaan Lokal : Suatu Dialektika Menuju Indonesia Baru, Padang, 18 – 21 Juli 2001

*) Makalah Simposium Internasional Globalisasi dan Kebudayaan Lokal : Suatu Dialektika Menuju Indonesia Baru, Padang, 18 – 21 Juli 2001